

DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2479>

P-ISSN: 2715-5218

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie>

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri



## STRATEGI PENYEBARAN INFORMASI PERSYARATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG

Iip Prasiswangto Taufik<sup>1</sup>, Fatahuddin Akhmad<sup>2</sup>, Endang Sri Hidayah<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba, <sup>2</sup>Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, <sup>3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Email: [iip.praiswanto@bulukumbakab.go.id](mailto:iip.praiswanto@bulukumbakab.go.id), [Fatah.chid234@gmail.com](mailto:Fatah.chid234@gmail.com), [sriendang@ipdn.ac.id](mailto:sriendang@ipdn.ac.id)

Received: 26-04-2022, Accepted: 22-09-2022; Published Online: 22-09-2022

*\*Corresponding author*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah analisis strategi penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan strategi penyebaran informasi syarat penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang melalui tahap penelitian komunikasi, perencanaan komunikasi, pelaksanaan, dan evaluasi cukup baik, namun kurang optimal karena penyebaran informasinya belum menggunakan internet. Kelemahan dalam penentuan komunikasi yaitu masyarakat tidak menjadi komunikasi dalam kegiatan sosialisasi, jumlah pelaksanaan sosialisasi yang terbatas (3 kali dalam setahun).

Kata Kunci : Strategi Komunikasi; Penyebaran informasi; Persyaratan Dokumen Kependudukan.

### ABSTRACT

*The purpose of this research strategy analytics the dissemination of information in of terms the issuance of population documents in The Population and Civil Registration of Enrekang District. This study is qualitative research the kind of research the case studies. Data collection techniques, through interviews nonparticipants, observation, and documentation. The informants did in purposive. The results of the study show that the strategy for disseminating information on the requirements for the issuance of population documents carried out by the Department of Population and Civil Registration of Enrekang District through the stages of communication research, communication planning, implementation, and evaluation is quite good, but less than optimal because the dissemination of information has not used the internet. Weakness in the determination of Dominican namely the public not being communicant in socialization activities, the number of the implementation of that limited socialization (3 times a year).*

*Keywords: The communications strategy; The dissemination of information; Documents population.*

## PENDAHULUAN

Dalam mengadakan pelayanan administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Enrekang perlu melakukan penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan. Instrument penting bagi kegiatan tersebut adalah penyebaran informasi yang efektif. Disdukcapil Kabupaten Enrekang harus memberi informasi dengan akurat dan tidak menyesatkan, karena bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Hal ini tertera dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008.

Jika penyebaran informasi berjalan efektif, informasi pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, cepat, menghemat biaya dan waktu serta mengurangi resiko berkas ditolak saat pengajuan pengurusan dokumen kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Enrekang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Enrekang terkait dalam hal syarat mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil.

Penyebaran informasi ini erat kaitannya dengan komunikasi. Dalam buku Morissan (2013), Stephen Littlejohn (1999) mengatakan bahwa komunikasi sulit didefinisikan, karena bersifat abstrak, terlalu banyak istilah, sehingga memiliki banyak arti).

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan suatu informasi dari 1 orang ke orang lain atau 1 orang kepada khalayak ramai, tujuan dilakukannya komunikasi adalah saling memahami antar komunikator dan komunikan, agar pesan tersampaikan dengan sempurna dan jelas kepada penerima. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi komunikasi.

Menurut Cangara (2017), strategi adalah konsep militer atau seni perang para

jenderal (*The Art of General*) atau rancangan terbaik, agar berhasil memenangkan peperangan. Strategi harus memiliki prinsip utama, yaitu mengetahui strategi perang musuh. Sedangkan tujuan strategi komunikasi menurut Liliweri (2011) antara lain sebagai berikut:

- a. Informasi yang disampaikan harus sesuai kapasitas dan kualitas dengan mendahulukan informasi utama yang dianggap paling penting untuk disampaikan kepada seseorang atau khalayak ramai
- b. Memotivasi masyarakat agar memahami dan meyakini informasi yang disampaikan
- c. Dalam menyampaikan informasi, informan harus mendidik dengan berperan untuk memberi edukasi kepada masyarakat.
- d. Memberi informasi dengan baik.
- e. Sebelum memutuskan sesuatu, hendaknya keputusan yang diambil telah melalui proses kategorisasi dan analisis, agar menjadi informasi yang akurat.

Pemerintah melakukan strategi komunikasi di lingkungan organisasi atau pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pasal 1 Ayat (1), pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan penunjang kebutuhan masyarakat, baik jasa, barang, atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Sinambela dalam (Agitia:2019), pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jika pemerintah memberi kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat, maka pelayanan dianggap prima dan memenuhi standar.

Dalam Peraturan Komunikasi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, standar layanan Informasi Publik antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik.
2. Badan Publik harus memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
3. Badan Publik harus menyampaikan informasi yang disediakan melalui situs resmi atau papan pengumuman agar mudah di akses masyarakat.
4. Badan publik non negara harus menyampaikan informasi yang disediakan melalui papan pengumuman agar mudah diakses masyarakat.
5. Penyampaian informasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta sesuai bahasa penduduk setempat.
6. Informasi mudah diperoleh masyarakat.

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan pemerintah antara lain Pelayanan Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan adalah penerbitan dokumen kependudukan melalui pencatatan sipil dan pengelola administrasi kependudukan untuk kepentingan sektor lain dan pelayanan publik lain.

Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Enrekang, telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan pada 12 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 112 Desa yang lokasinya tersebar di Kabupaten Enrekang. Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Enrekang terletak di Jalan Pasar Baru No. 7 Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas kependudukan

catatan sipil Kabupaten Enrekang sangat berhubungan pada keterbukaan informasi publik, diaman bertujuan sebagai kedaulatan rakyat dan informasi merupakan suatu kebutuhan pokok sebagai perwujudan hak asasi manusia bagi pengembangan diri dan lingkungan sosial.

Adapun fakta yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian di Disdukcapil Kabupaten Enrekang adalah mewawancarai beberapa petugas pelayanan yaitu Bapak Sadrat. Ia mengatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui informasi tentang syarat pengurusan dokumen kependudukan di Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Enrekang, sehingga berkas yang diajukan ditolak oleh Pihak Penyelenggara Pelayanan Publik karena tidak lengkapnya berkas penunjang dalam pengurusan dokumen.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Desna Katindo selaku petugas pelayanan informasi. Beliau memperkirakan, masyarakat yang datang ke Disdukcapil berkisar 50 - 55 orang setiap harinya. Dari jumlah tersebut, berkas yang ditolak oleh petugas pelayanan berkisar 10-15 berkas per hari.

Pengurusan dokumen kependudukan di Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Enrekang beragam, seperti Kartu keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, KTP-el dan sebagainya. Oleh karena itu, strategi komunikasi sangat diperlukan pihak Disdukcapil agar informasi dapat tersebar kepada masyarakat juga memahami syarat pengurusan dokumen kependudukan.

Dari fakta diatas, peneliti melakukan pengkajian tentang Strategi Penyebaran Informasi Persyaratan Penerbitan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang .

## TINJAUAN TEORITIS

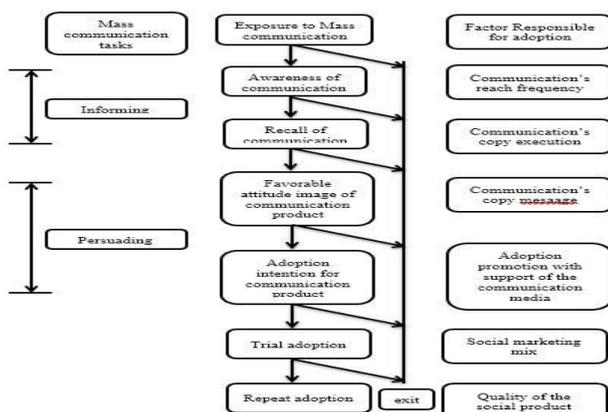
### 1. Model Penyebaran Informasi *Hierarchy Effect*

Model tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu untuk menginformasikan dan membujuk. Menginformasikan berarti mengenalkan, menyadari dan mengingat, sedangkan membujuk berarti bersifat positif, memperhatikan, mencoba dan mengulangi. Model ini memiliki perencanaan komunikasi antara lain:

- Tujuan kegiatan komunikasi;
- Bahan penyampaian informasi;
- Teknik penyampaian informasi;
- Tempat penyampaian informasi;
- Waktu penyampaian informasi;

Penetapan tujuan harus sesuai hasil yang dicapai untuk menentukan isi pesan dlm informasi. Teknik dan tempat penyampaian informasi menentukan media yang dipilih dalam menyampaikan informasi.

Waktu penyampaian informasi harus sesuai situasi, yaitu tidak peristiwa seperti bencana alam agar penyampaian informasi berjalan lancar. (Cangara : 2017).



Gambar 2.1 Model Penyebaran informasi (Cangara :2017)

### 2. Teori Difusi Inovasi

Menurut pendapat Rogers (1995), difusi inovasi mempunyai 4 elemen yaitu sebagai berikut :

- Inovasi merupakan tindakan atau barang, jadi harus subjektif bagi

penerima informasi.

- Alat penyampaian pesan inovasi dari informan kepada penerima. Untuk mengenalkan inovasi pada khalayak ramai, maka salurannya harus tepat, cepat dan efisien,. Sedangkan jika untuk mengubah sikap penerima, maka salurannya harus tepat adalah interpersonal.
- Jangka waktu, yaitu inovasi dilandasi pengetahuan untuk mencapai keputusan menerima dan menolaknya. Pengambilan keputusan bergantung pada dimensi waktu,. Orang yang inovatif relatif lebih cepat menerima inovasi, serta seera mengambil inovasi dalam sistem sosial.
- Sistem sosial digunakan untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan bersama.

Asumsi Everet.M.Rogers dalam Bungin (2008) tentang tahap difusi inovasi, yaitu sebagai berikut:

- Pengetahuan adalah inovasi yang sudah dipahami dan disadari oleh seseorang;
- Persuasi adalah seseorang tidak setuju atau setuju dengan inovasi;
- Keputusan adalah seseorang memilih untuk memakai inovasi;
- Pelaksanaan adalah seseorang melaksanakan keputusan yang dipilihnya;
- Konfirmasi adalah mencari pendapat lain untuk menguatkan keputusan yang diambil, jika informasi berlawanan satu sama lain, maka keputusan dapat berubah.

Bungin (2008) memaparkan inovasi melalui saluran dan waktu bagi anggota sistem sosial,, agar masyarakat melakukan upaya difusi inovasi sesuai mata pencahariannya.

Rogers dalam Cangara (2017) juga menjelaskan proses pengenalan inovasi dari ide dengan serangkaian tahap berikut:

a. Tahap awal

Publik menerima ide berdasarkan wawasan lingkungannya, yang merubah sesuatu sesuai kepribadiannya untuk menerima inovasi.

b. Proses

Inovasi didukung oleh pengetahuan karena berhubungan dengan sistem sosial, karena inovasi berkesinambungan dengan budaya dan sistem sosial penerima, bahkan terjalin komunikasi untuk menjaga toleransi dan menghindari penyimpangan.

c. Konsekuensi

Tahap ini adalah keadaan setelah terjadi adopsi inovasi, yaitu penerimaan inovasi.

### 3. Model Komunikasi Dua Tahap

Model ini digagas oleh Paul Lazarfeld, Bernard Bavelson dan H Gudet dalam *People's Choice* (1944) untuk menyempurnakan model alir satu tahap. Dalam model ini, media massa berperan sangat tipis dalam mempengaruhi penerima dan diperantarai pemuka pendapat (Nurudin : 2004)..

Pada wilayah pedesaan, pendidikan yang belum begitu baik dan penerima atau masyarakat yang pasif terhadap media massa, mengakibatkan perantara mengambil peran sebagai pemuka pendapat. Hal ini dikarenakan lingkungan tradisional pedesaan membuat seseorang merasa berkedudukan karena merasa pendidikan dan wibawa tinggi akan menjadikannya sebagai pemuka pendapat yang dipercaya daripada informasi media massa. Jadi, peran media massa digantikan pemuka pendapat dan diteruskan kepada pengikut.

Berbeda dengan masyarakat

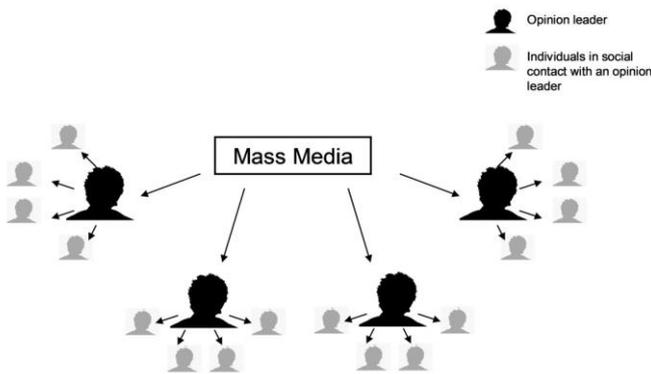
perkotaan dengan hidup modern yang memiliki akses media massa, model komunikasi dua tahap ini diterapkan dalam penggunaan *hashtag* (#) media sosial sebagai pemuka pendapat untuk menggiring topik bahasan agar dikupas oleh pihak yang sewaktu-waktu menjadi pemuka pendapat. Hal ini karena media sosial yang berperan sebagai penghubung pada masyarakat dapat menyampaikan aspirasi pada komunikator (Unde:2014) seperti pemberian komentar pada postingan di media sosial.

Dari postingan yang telah dikomentari oleh masyarakat, kemudian pemuka pendapat menyaringnya dengan *hashtag* (#). Jadi, masyarakat tidak langsung menerima informasi mentah dari postingan, melainkan dengan perantara yang menjadi penyampai pesan media massa yang terbatas, karena kemungkinan pesan yang diterima masyarakat sudah ditasirkan pemukapendapat sesuai kapasitas, minat dan kepentingan.

Wilbur Schramm dan William Porter (1982) mengkritik 2 unsur diatas menjadi pendapat berikut (Nurudin : 2004) :

1. Media massa memiliki kredibilitas tinggi, karena memudahkan masyarakat mengakses pesan tanpa perantara.
2. Pihak yang berperan sebagai pemuka pendapat perlu menelaah informasi mendalam, karena pemuka pendapat harus berpendidikan tinggi dan terbiasa dengan komunikasi massa.

## Two-step flow model



Gambar 2.2 Model Komunikasi Dua Tahap

### 4. Strategi Penyebaran Informasi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*stratos*” yang berarti tentara dan kata “*agein*” yang artinya memimpin, kemudian keduanya digabungkan menjadi “memimpin tentara”. Kemudian istilah *strategos* yang diartikan pemimpin tentara tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer sebagai seni perang para jenderal atau rancangan terbaik kemenangan perang.

Menurut Iriantara (2005) dalam Hanafi (2016), strategi adalah kebijakan untuk pencapaian tujuan kemudian disusun menjadi taktik pencapaian tujuan yang ditetapkan. Mintzberg dalam Liliweri (2011), mengemukakan 4 makna strategi, yaitu:

- Strategi adalah rencana mendapatkan sesuatu;
- Strategi adalah tindakan dari waktu ke waktu;
- Strategi adalah keputusan dalam penempatan posisi;
- Strategi adalah pandangan organisasi untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan yang berkaitan dengan budaya dan tujuan organisasi.

Menurut Kriyantono (2017), surat kabar, majalah dinding, publisitas media, maupun iklan adalah strategi komunikasi

untuk menemukan informasi (Kriyantono : 2006). Adapun 4 tahap strategi komunikasi antaralain:

- Menganalisis situasi dengan melakukan penelitian untuk menemukan masalah dan peluang;
- Mengembangkan strategi dengan melakukan perencanaan untuk masalah yang ditemukan;
- Perencanaan dilakukan dengan alat komunikasi untuk mencapai tujuan;
- Mengadakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan strategi komunikasi (suryadi : 2018).

Sedangkan tahapan manajemen strategi menurut Fred R. David antara lain:

- Perumusan strategi yang terdiri atas pengembangan visi dan misi organisasi, identifikasi peluang ancaman dari luar organisasi, menemukan kekuatan dan kelemahan organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat strategi alternatif untuk organisasi.
- Perencanaan strategi harus sesuai sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan serta alokasi sumber daya agar strategi dapat dijalankan.
- Pelaksanaan strategi berisi pengembangan budaya sesuai strategi, membuat struktur organisasi, mengarahkan pemasaran lebih baik, menyiapkan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan informasi serta memberi kompensasi bagi karyawan yang kinerjanya baik dalam organisasi.
- Evaluasi strategi memiliki 3 kegiatan pokok yaitu mengkaji ulang faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja karyawan dan mengoreksi tindakan karyawan (Suryadi : 2018). Middleton (1980) sebagai pakar

perencanaan komunikasi mendefinisikan strategi komunikasi adalah gabungan elemen komunikasi seperti komunikator, media, penerima hingga efek, karena berpengaruh pada tercapainya tujuan komunikasi (Cangara : 2017).

Menurut McNichols, strategi komunikasi adalah strategi modern dan sederhana, yaitu seni penggunaan kecakapan dan sumber daya organisasi disertai hubungan baik dan saling menguntungkan dengan lingkungan untuk mencapai sasaran (Nurhaidar : 2009).

Perencanaan dalam sebuah strategi adalah proses penetapan untuk identifikasi syarat yang dipenuhi untuk melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien (Kaufman : 1972).

Menurut Ruben & Stewart (1998), strategi komunikasi memerlukan komunikator yang memenuhi kriteria seperti dekat dengan publik, karena komunikator harus mementingkan kepentingan penerima, oleh karena itu kedekatan komunikator dengan penerima dapat memengaruhi penyampaian pesan (Unde : 2014).

Tujuan utama strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett, terdiri atas tiga tujuan, yaitu:

- a. untuk memastikan komunikan memahami pesan yang diterima;
- b. Komunikan menemukan makna dalam pesan yang diterima;
- c. komunikan dapat memotivasi dirinya sesuai pesan yang diterima.

Tujuan strategi komunikasi Menurut Liliweri (2011) antara lain :

- a. Pemberitahuan kualitas dan kapasitas informasi. Jadi, informasi harus berhubungan seluruh informasi penting;

- b. Informasi dapat membuat masyarakat untuk memotivasi dirinya;
- c. Informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan;
- d. Menyebarluaskan informasi pada masyarakat;
- e. Mendukung keputusan dari informasi yang telah dianalisis dan dikelompokkan.

Elemen penyusunan strategi komunikasi menurut Effendy (2011) antara lain sebagai berikut :

- a. Mengenali sasaran komunikasi sesuai tujuan komunikasi dengan melihat komunikan melakukan tindakan persuasif atau sekedar menerima informasi yang diberikan.
- b. Pemilihan media komunikasi seperti spanduk, surat kabar, majalah, film, radio, telepon, telegram, surat, televisi dan sebagainya, sesuai kelebihan dan kekurangannya.
- c. Mengkaji tujuan komunikasi bertujuan menentukan teknik yang diambil dan isi pesan yang akan disampaikan.
- d. Peran komunikator dalam komunikasi antara lain:
  1. Mengubah sikap, perilaku dan pendapat komunikan melalui mekanisme daya tarik,
  2. Memiliki kredibilitas jika komunikator memiliki keahlian atau profesi.

Menurut Ferguson (2009), 2 faktor penting yang harus dimiliki komunikator adalah dipercaya oleh komunikan dan memiliki keahlian.

## 5. Penyebaran Informasi

Menurut Hasugian dalam Fitriani (2017), informasi diartikan sebagai data yang diolah, diproses, dan dimodifikasi agar memberi makna bagi penerimanya.

Menurut *Burch* dalam *Wiryanto* (2004), informasi yang berkualitas dilihat dari kecermatan, ketepatan waktu dan relevansinya. Informasi yang akurat akan terbebas dari kecacatan, informasi yang tepat waktu akan member manfaat bagi masyarakat jika membutuhkan informasi tersebut serta relevan jika sesuai perencanaan. Kualitas informasi ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman seseorang dalam mengolah informasi. Sedangkan kualitas pesan ditentukan oleh kemampuan dan kreativitas seseorang dalam mengolah informasi menjadi pesan. Kualitas informasi menurut *Mulyanto* dalam *Fitriani* (2017), dilihat dari:

- a. Informasi harus akurat karena jika terjadi gangguan yang merusak informasi, maka informasi bebas dari kesalahan.
- b. Informasi harus tepat waktu artinya informasi harus disampaikan saat masyarakat membutuhkan informasi tersebut.
- c. Informasi harus relevan artinya bermanfaat bagi penerimanya.

Adapun 3 konsep informasi menurut *Aubrey Fisher* dalam *Wiryanto* (2004) adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan fakta atau data yang diperoleh dari komunikasi, karena informasi digring dari seseorang kepada yang lainnya atau seseorang kepada sekelompok orang. Semakin banyak fakta atau data yang diperoleh, informasi yang diperoleh juga melimpah.
- b. Dalam informasi, menunjukkan makna data, karena terdapat makna yang terkandung didalamnya. Data yang didapat memiliki informasi jika penafsirnya sesuai kualitas informasi.
- c. Informasi adalah ketidakpastian yang diukur dengan alternatif yang

digunakan untuk menepis ketidakpastian tersebut.

Faktor yang mempengaruhi khalayak menerima informasi menurut *Ruben* dalam *Cangara* (2014) antara lain:

1. Penerima :
  - a. Terampil dalam berkomunikasi
  - b. Informasi sesuai kebutuhan penerima
  - c. Tujuan penerima membutuhkan informasi
  - d. Sikap, nilai, kepercayaan dan kebiasaan penerima
  - e. Kemampuan penerima dalam menerima pesan dari informasi yang disampaikan
  - f. Manfaat pesan informasi bagi penerima
2. Pesan :
  - a. Tipe dan Model Pesan
  - b. Karakteristik dan fungsi pesan
  - c. Struktur pengelolaan pesan
  - d. Aktualitas pesan
3. Sumber :
  - a. Kredibilitas dan Kompensasi sesuai bidang
  - b. Kedekatan penerima dengan sumber
  - c. Motivasi dan perhatian
  - d. Kesamaan dengan penerima
  - e. Teknik penyampaian pesan
  - f. Memiliki daya tarik dalam menyampaikan informasi
4. Media :
  - a. Tersedianya media
  - b. Kecanggihan daya liput media
  - c. Penerima pesan terbiasa menggunakan media
  - d. Tempat dan situasi

Syarat dalam menyebarkan informasi menurut *Sastropetro* (1990) antara lain sebagai berikut:

- a. Informasi harus tersusun jelas dan singkat agar dipahami. Hal ini

- dikarenakan daya tangkap setiap orang berbeda.
- b. Lambang yang digunakan dipahami dan dimengerti penerima.
  - c. Pesan yang disampaikan harus mengandung minat bagi penerima pesan.
  - d. Pesan yang disampaikan harus timbul keinginan dari penerima untuk pemecahan masalah.
  - e. Pesan harus menimbulkan rangsangan agar diterima positif.

Sifat informasi adalah informatif, edukatif dan persuasif. De Vito dalam Riyanto & Mahfud (2012) menuturkan bahwa informasi yang persuasif memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengubah sikap penerima
2. Mendorong penerima melakukan sesuatu sesuai harapan.

Gangguan komunikasi juga mempengaruhi penyebaran informasi. Shannon dan Weaver dalam Cangara (2014) menyebutkan bahwa gangguan komunikasi terjadi jika salah satu komponen komunikasi mendapat ancaman yang membuat proses komunikasi tidak efektif.

Gangguan komunikasi terdapat 8 macam yaitu (Cangara : 2014) :

- a. Gangguan teknis yang terjadi pada saat alat komunikasi mengalami kerusakan
- b. Gangguan semantik yang disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan. Hal ini terjadi karena faktor berikut:
  1. Menggunakan bahasa asing yang menyebabkan masyarakat kesulitan memahami informasi.
  2. Perbedaan bahasa komunikasi yang di gunakan komunikator dengan komunikan.

3. Penerima informasi tidak memahami penggunaan struktur bahasa komunikator.
  4. Kesalahpahaman komunikan terhadap simbol bahasa yang digunakan komunikator karena latar belakang budaya.
- c. Gangguan psikologis terjadi karena masalah dalam diri komunikator atau komunikan
  - d. Rintangan fisik yang disebabkan kondisi geografis. Rintangan fisik juga dikatakan gangguan organik terhadap manusia dalam berinteraksi.
  - e. Rintangan status terjadi karena jarak sosial peserta komunikasi.
  - f. Rintangan kerangka berfikir terjadi karena perbedaan pendapat antar komunikator dan komunikan karena latar belakang pendidikan yang berbeda.
  - g. Rintangan budaya terjadi karena perbedaan nilai, kebudayaan dan norma yang diikuti komunikan.
  - h. Rintangan birokrasi terjadi dalam proses komunikasi struktur organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus, yang bertujuan menjelaskan gambaran tentang strategi komunikasi yang digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dalam penyebarluasan informasi tentang syarat penerbitan pada dokumen kependudukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer di dapat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan terkait pokok penelitian .

2. Data sekunder di dapat dari hasil telaah dokumen atau literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana pemilihan informan adalah orang-orang yang memiliki informasi, pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan atau sedang berkecimpung dalam bidang pengelolaan informasi di Disdukcapil Kabupaten Enrekang.

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian (Satori : 2009). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi Non-Partisipan, dan Dokumentasi.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Strategi Penyebaran Informasi Persyaratan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil baik mempunyai peran sebagai unit pelaksana bagi masyarakat untuk menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan. Setiap penduduk harus atau wajib melaporkan setiap peristiwa-peristiwa kependudukan yang terjadi pada dirinya kepada unit pelaksana yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk diterbitkan dokumen-dokumen kependudukan. Contoh dokumen kependudukan adalah kartu keluarga (KK), akta pencatatan sipil, kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), surat keterangan kependudukan.

Manfaat dokumen kependudukan sangat vital karena selain menjadi dokumen dasar untuk mengurus keperluan lain di kantor-kantor pelayanan publik lainnya, dokumen kependudukan juga sebagai perwujudan dari negara untuk melindungi status hak sipil penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil wajib menyebarkan informasi ke masyarakat betapa pentingnya dokumen kependudukan dan persyaratan-persyaratan untuk bisa menerbitkan dokumen kependudukan. Seperti yang dikemukakan oleh Fred R. David, penelitian, perencanaan dan evaluasi komunikasi sangat dibutuhkan agar penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan efektif dan efisien.

#### a. Penelitian Komunikasi

Terkait dengan penelitian ini, Disdukcapil Kabupaten Enrekang mencari informasi-informasi yang bisa menjadi hambatan atau peluang dalam menyebarkan informasi terkait persyaratan penerbitan dokumen kependudukan dengan cara berkoordinasi dengan Kepala Kecamatan dengan Kepala Dinas.

#### b. Perencanaan Komunikasi

Dalam strategi penyebaran informasi, perencanaan yang baik dapat menghasilkan tujuan yang terarah. Penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Enrekang melalui perencanaan yang terkoordinasi diantara para pemangku jabatan Disdukcapil Kabupaten Enrekang.

Penetapan strategi dalam perencanaan komunikasi terkait penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan tidak terlepas dari unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, media, dan komunikan. Jadi, strategi yang

dijalankan dalam perencanaan komunikasi terkait penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan diawali dengan sebagai berikut :

1. Dalam penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dalam dokumen kependudukan, komunikator adalah orang yang berpengetahuan dan memahami pesan atau materi yang akan disampaikan yaitu :Kepala Disdukcapil kabupaten Enrekang, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil , dan Kepala Kantor Disdukcapil Makassar
2. Pesan yang bersifat informatif berarti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang menyampaikan informasi atau pesan yang bernilai pengetahuan kepada masyarakat dimana sebelumnya mereka tidak mengetahui akan hal-hal yang disampaikan tersebut. Pesan yang bersifat persuasif berarti harapan Disdukcapil Kabupaten Enrekang akan adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap informasi yang telah diterima tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan, agar masyarakat sadar bahwa dokumen kependudukan harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Disdukcapil Kabupaten Enrekang berharap agar masyarakat inisiatif mengurus atau memperbaharui dokumen kependudukannya.
3. Pemilihan media yang tepat, akan membuat pesan atau informasi tersampaikan dengan baik. Media yang digunakan Disdukcapil Kabupaten Enrekang dalam penyebaran informasi tentang syarat

penerbitan dokumen kependudukan adalah komunikasi kelompok melalui sosialisasi dan pembagian brosur.

4. Komunikasikan, Komunikasikan adalah sasaran komunikasi atau yang menerima informasi dari komunikator. Komunikasikan dari kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan adalah Kepala Desa, Kepala Lurah, Tokoh masyarakat dan Kepala KUA. Komunikasikan diharapkan dapat meneruskan informasi yang diterima karena merupakan ujung tombak pemerintahan desa/kelurahan.

#### **c. Pelaksanaan**

Kegiatan sosialisasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan 3 kali dalam setahun tergantung keuangan Disdukcapil Kabupaten Enrekang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga tahun 2020. Penentuan tempat sosialisasi juga perlu diperhatikan untuk mempermudah peserta sosialisasi hadir dalam kegiatan sosialisasi. Dalam hal ini tempat sosialisasi berada pada Kantor Kecamatan dan Kantor Bupati.

#### **d. Evaluasi**

Evaluasi merupakan pengkajian dan penilaian keberhasilan kegiatan komunikasi yang dilakukan yang bertujuan memperbaiki kealasan sebelumnya. Evaluasi kegiatan sosialisasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program tersebut. Evaluasi dilakukan oleh Disdukcapil agar memberikan perbaikan dari kesalahan.

**Tabel 1. Matriks Hasil Penelitian**

| No | Indikator                            | Rangkuman Wawancara   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | Penelitian Komunikasi                | Mencari informasi yang bisa menjadi hambatan atau pendukung dalam penyebaran informasi melalui :<br>1) Kepala Kecamatan<br>2) Hasil kegiatan tahun lalu   |
| 2  | Perencanaan Komunikasi (Komunikator) | Menentukan komunikator dengan memperhatikan kredibilitas dan daya tarik dan yang menjadi komunikator :<br>1) Kepala Dinas Disdukcapil<br>2) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk<br>3) Kepala Bidang Pencatatan Sipil<br>4) Perwakilan Disdukcapil Makassar |
|    | Perencanaan Komunikasi (Pesan)       | Jenis pesan yaitu informatif dan persuasif  |
|    | Perencanaan Komunikasi (Media)       | Media yang digunakan :<br>1) Komunikasi Kelompok (Kegiatan Sosialisasi)<br>2) Brosur  |
| 3  | Pelaksanaan Komunikasi               | Peserta kegiatan sosialisasi :<br>1) Kepala Lurah<br>2) Kepala Desa<br>3) Kepala KUA<br>4) Tokoh Masyarakat   |
|    |                                      | Kegiatan sosialisasi dilaksanakan tiga kali dalam setahun di tiga lokasi berbeda :<br>1) Kecamatan Anggeraja<br>2) Kecamatan Masalle<br>3) Kecamatan Curio  |
| 4  | Evaluasi Komunikasi                  | 1) Menetapkan komunikator dari pegawai Disdukcapil Kabupaten Enrekang<br>2) Menambah jumlah komunikan yaitu Sekretaris Desa, Sekretaris Kelurahan dan ibu PKK   |

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Sosialisasi Sebagai strategi Penyebaran Informasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, Disdukcapil Kabupaten Enrekang melakukan sosialisasi penyebaran

informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan, karena pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Disdukcapil Kabupaten Enrekang melakukan penelitian dengan mencari

informasi-informasi yang bisa menjadi peluang atau hambatan dalam melaksanakan penyebaran informasi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan sehingga pelaksanaannya menjadi efektif.

Dalam hal penelitian, Disdukcapil Kabupaten Enrekang mencari informasi terkini kondisi wilayah yang akan menjadi tempat kegiatan sosialisasi dengan yang menjadi sumber informasi adalah Kepala Kecamatan setempat. Selain itu Disdukcapil Kabupaten Enrekang mencari informasi daerah yang sedikit kepemilikan dokumen kependudukan yang dilihat dari data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan tujuan daerah tersebut menjadi lokasi kegiatan sosialisasi. Tetapi pada kenyataannya, Disdukcapil Kabupaten Enrekang memilih kecamatan berbeda dari apa yang ditampilkan oleh data SIAK.

Disdukcapil Kabupaten Enrekang juga melakukan penelitian dengan mendapatkan informasi dari hasil evaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menjadi bahan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini senada dengan pendapat Kriyantono (2006) bahwa penelitian adalah pencarian informasi untuk menemukan informasi.

Dalam menyebarkan informasi terkait syarat pada penerbitan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tidak melakukan pencarian informasi terkait asal daerah masyarakat yang berkasnya sering di tolak Disdukcapil, karena Disdukcapil Kabupaten Enrekang tidak melakukan pencatatan atau tidak melakukan perekapan data (manual atau berbasis aplikasi) terhadap setiap masyarakat yang datang ke

kantor tetapi berkasnya ditolak dikarenakan kurangnya persyaratan administrasi padahal ini adalah informasi dasar untuk mengetahui apakah kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan bisa dikatakan sukses atau tidak.

Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Enrekang memilih tempat sosialisasi yang berbeda dari apa yang terdapat di SIAK. Pada SIAK, tiga kecamatan terendah dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan adalah Kecamatan Enrekang, anggeraja dan maiwa, tetapi yang terpilih menjadi tempat kegiatan sosialisasi adalah kecamatan anggeraja, masalle dan curio. Selanjutnya, Disdukcapil tidak melakukan penelitian mencari informasi apakah kegiatan sosialisasi adalah cara yang paling efektif dalam menyebarkan informasi. Jadi menurut peneliti, strategi penyebaran informasi dalam hal penelitian komunikasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Enrekang masih kurang maksimal

Setelah penelitian komunikasi, strategi penyebaran informasi selanjutnya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Enrekang adalah perencanaan komunikasi. Dalam hal perencanaan komunikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan bisa tercapai adalah tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi seperti penentuan komunikator, pesan, media dan komunikan.

Komunikator yang dipilih Disdukcapil Kabupaten Enrekang merupakan orang yang memiliki kredibilitas dan daya tarik karena komunikan cenderung akan mendengarkan informasi dari sumber terpercaya karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki komunikator.

Disdukcapil Kabupaten Enrekang menetapkan komunikator dengan memperhatikan latar belakang pengetahuan

atau penguasaan materi dan bidangnya. Pemilihan pejabat Disdukcapil Kabupaten Enrekang seperti Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas Disdukcapil sebagai komunikator dilandasi pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang dimiliki, juga adanya kedekatan sosial dengan komunikan.

Perencanaan komunikasi adalah menentukan isi pesan yang disampaikan. Hasil penelitian, pesan terkait penyebaran informasi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan bersifat informatif dan persuasif. Pesan yang bersifat informatif yaitu Disdukcapil Kabupaten Enrekang menyampaikan informasi yang bernilai pengetahuan kepada komunikan (kepala desa, kepala lurah, tokoh masyarakat dan kepala KUA) dan masyarakat, yang berarti bertambahnya ilmu pengetahuan bagi mereka. Jadi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan tidak lagi mengalami penolakan karena kekurangan berkas disebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap syarat-syarat penerbitan dokumen kependudukan.

Pesan juga bersifat persuasif yaitu berharap adanya perubahan sikap dari masyarakat setelah terlaksananya penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan dan berinisiatif mengurus dokumen kependudukan.

Hal ini sesuai dengan penyebaran informasi *Hierarchy Effect* yang memiliki dua fungsi yaitu pesan yang bersifat menginformasikan dan pesan yang bersifat persuasif. Model penyebaran informasi *Hierarchy Effect*, pesan yang bersifat menginformasikan bertujuan untuk memperkenalkan informasi, gagasan dan inovasi kepada masyarakat. Sedangkan pesan yang bersifat persuasif, menurut De

Vito dalam Riyanto & Mahmud (2012) bertujuan mengubah atau menguatkan keyakinan dan sikap penerima.

Selain itu, hal diatas sesuai dengan salah satu konsep penyebaran informasi menurut Sastropetro (1990), yang mengatakan bahwa pesan yang disampaikan harus menimbulkan minat, perhatian dan keinginan masyarakat untuk bertindak.

Untuk menunjang keberhasilan dalam penyebaran informasi, pesan yang disampaikan juga menggunakan bahasa daerah setempat dengan harapan komunikan mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi menurut peneliti, penentuan isi pesan dalam kegiatan sosialisasi penyebaran informasi telah efektif.

Perencanaan komunikasi adalah penentuan media yang digunakan. Media yang digunakan Disdukcapil Kabupaten Enrekang untuk penyebarluasan informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan adalah komunikasi kelompok dan brosur.

Komunikasi kelompok dilakukan Disdukcapil dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang berjudul sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Enrekang. Disdukcapil Kabupaten Enrekang mengadakan kegiatan sosialisasi yang mempertemukan komunikan (kepala desa, kepala lurah, kepala KUA dan tokoh masyarakat) dengan komunikator dalam satu tempat dan waktu yang sama yaitu di ruang aula kantor kecamatan, yang diharapkan informasi yang disampaikan oleh komunikator lebih mudah ditangkap/dipahami oleh komunikan ditambah saat kegiatan sosialisasi berlangsung komunikator menyampaikan informasi menggunakan speaker wireless sehingga dapat

meminimalisir hambatan-hambatan komunikasi (*noise*).

Kegiatan sosialisasi dilakukan di aula Kantor Kecamatan, agar jarak komunikasi dan komunikator tidak terlalu jauh sehingga mengurangi gangguan komunikasi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ruben dan Stewart (1998) yaitu jarak khalayak dengan komunikator mempengaruhi pesan yang tersampaikan. Jarak yang dimaksud adalah jarak fisik atau jarak sosial.

Dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi dapat langsung bertanya kepada komunikator dalam sesi tanya jawab yang dimana dapat menambah ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh komunikasi (kepala desa, kepala lurah, kepala KUA dan tokoh masyarakat) secara langsung dilapangan.

Media yang kedua adalah brosur. Brosur digunakan Disdukcapil Kabupaten Enrekang dalam menyebarkan informasi karena mudah dan ringan untuk di sebar ke masyarakat. Brosur mengandung nilai informatif, maka bisa dijadikan sebagai bahan koleksi dimana masyarakat dapat menyimpan sesuka hati dan dapat membaca ulang sewaktu-waktu.

Didalam brosur terdapat informasi terkait syarat pengurusan dokumen kependudukan. Tetapi dalam pelaksanaannya saat kegiatan sosialisasi, Disdukcapil hanya membagikan brosur dalam jumlah sedikit kepada komunikasi dikarenakan brosurnya belum tercetak dan yang dibagikan adalah kelebihan dari brosur tahun lalu. Ini dikarenakan pegawai Disdukcapil yang bertanggungjawab terhadap pengadaan brosur berbeda dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap pengadaan kegiatan sosialisasi. Ditambah dengan kemampuan anggaran Disdukcapil Kabupaten Enrekang dalam pengadaan

brosur, banner dan spanduk tidak seberapa hanya 7 (tujuh) juta per tahun.

Pemilihan brosur sebagai media untuk penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan pada masyarakat kurang maksimal karena seharusnya saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan, brosur juga sudah siap untuk dibagikan ke komunikasi.

Untuk keseluruhan, pemilihan media yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam menyebarkan informasi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan menurut peneliti masih kurang efektif dikarenakan tidak memanfaatkan media internet

(Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter) yang bisa dijangkau dan diakses kapan saja oleh masyarakat.

Perencanaan komunikasi adalah menentukan komunikasi. Komunikasi pada kegiatan sosialisasi penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan adalah Kepala Desa, Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat.

Disdukcapil Kabupaten Enrekang memilih atau menetapkan komunikasi yaitu Kepala Lurah, Kepala Desa, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dengan harapan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para komunikasi menyampaikan atau menyebarkan informasi yang diterimanya ke masyarakatnya masing-masing.

Hal ini sesuai dengan model komunikasi dua tahap yaitu pesan yang disampaikan pada masyarakat tidak bersifat langsung melainkan melalui pemuka pendapat. Sebagai penyempurnaan model alir satu tahap, media massa memiliki peran tipis dalam mempengaruhi penerima.

Hasil penelitian, Disdukcapil Kabupaten Enrekang tidak mengundang

langsung masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dikarenakan terbatasnya kemampuan atau biaya dari Disdukcapil yang tidak mampu menanggung biaya dari sejumlah masyarakat di lokasi kegiatan sosialisasi dan tidak adanya tempat yang bisa menampung banyak orang. Jadi dalam pelaksanaannya, menurut peneliti kurang efektif karena informasi tidak langsung sampai ke masyarakat yang dimana bisa saja terjadi bias-bias informasi atau bahkan informasi tidak sampai ke masyarakat.

Setelah penelitian komunikasi dan perencanaan komunikasi, strategi penyebaran informasi selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang adalah pelaksanaan komunikasi. Disdukcapil Kabupaten Enrekang melakukan penyebaran informasi tentang syarat pada penerbitan dokumen kependudukan melalui kegiatan sosialisasi menggunakan brosur. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi hanya dilakukan tiga kali dalam setahun di tiga lokasi berbeda dalam skala kecamatan. Kegiatan sosialisasi sudah 3 tahun dilaksanakan, di tahun 2017 dan 2019 dilaksanakan di tiga lokasi berbeda dalam skala kecamatan sedangkan di tahun 2018 dilaksanakan hanya sekali di ruang aula kantor bupati.

Komunikator dalam kegiatan sosialisasi adalah Kepala Dinas Disdukcapil, Kepala Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta perwakilan dari Dinas kependudukan Kota Makassar dan yang menjadi komunikan adalah Kepala Desa, Kepala KUA dan Tokoh masyarakat

Hal ini sesuai dengan teori difusi inovasi yang mana informasi disampaikan melalui saluran dan waktu tertentu terhadap sekelompok anggota dari sistem sosial.

Inovasi adalah gagasan, informasi, atau tindakan baru yang diukur subjektif bagi penerima.

Disdukcapil Kabupaten Enrekang hanya bisa melakukan kegiatan sosialisasi sebanyak tiga kali dalam setahun di tiga kecamatan berbeda (Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Curio dan Kecamatan Masalle), dikarenakan terbatasnya kemampuan atau dana yang dimiliki oleh Disdukcapil. Jadi menurut peneliti, pelaksanaannya kurang maksimal karena hanya dilaksanakan di tiga kecamatan, padahal Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan dan bahkan bukan hanya di tiap kecamatan tetapi di tiap desa, kegiatan sosialisasi ini harus dilaksanakan.

Setelah penelitian, perencanaan dan pelaksanaan komunikasi, strategi penyebaran informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang adalah evaluasi komunikasi. Evaluasi Komunikasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi. Dalam kegiatan sosialisasi dalam penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Enrekang melakukan evaluasi dengan menetapkan komunikator dari pegawai sendiri yaitu Kepala bidang pelayanan pencatatan sipil, Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk serta kepala dinas agar tidak lagi mengundang pemateri dari luar pegawai karena pembahasannya melenceng dari informasi yang seharusnya disampaikan.

Disdukcapil Kabupaten Enrekang juga melakukan evaluasi untuk kegiatan sosialisasi di tahun berikutnya dengan menambah komunikan/peserta kegiatan sosialisasi yaitu Kepala Sekretaris desa, Kepala Sekretaris Lurah dan PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga). Mengapa demikian, dari hasil wawancara

mengatakan bahwa kepala desa atau kepala lurah biasanya hanya sekali mereka sampaikan ke masyarakatnya, mereka merasa tanggungjawabnya untuk menyebarkan informasi sudah gugur. Dipilih kepala sekretaris desa atau kepala sekretaris lurah agar saat masyarakat datang mengurus ke kantor desa atau lurah, mereka bisa langsung menyampaikannya ke masyarakat. Kenapa PKK dipilih sebagai komunikan, karena PKK juga sering terjun ke lapangan setiap ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Hal ini sesuai dengan konsep strategi penyebaran informasi menurut Fred R. David dalam buku Suryadi (2018), bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pokok pada evaluasi strategi yaitu mengkaji ulang pada faktor yaitu eksternal dan internal yang akan menjadi landasan dalam perumusan strategi yang diterapkan untuk mengukur suatu kinerja dan koreksi. Dalam hal evaluasi, Disdukcapil Kabupaten Enrekang tidak bisa penerimaan informasi oleh masyarakat karena tidak adanya perekapan data masyarakat yang berkasnya ditolak untuk penerbitan dokumen kependudukan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam penyebaran informasi tentang syarat penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang cukup baik. Kekurangannya adalah tidak menggunakan media internet dalam menyebarkan informasi serta tidak berpartisipasi masyarakat sebagai komunikan dan jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi hanya 3 kali dalam setahun.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Abidin, Yusuf Zainal. 2015. *Manajemen Komunikasi*. Pustaka Setia : Bandung.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Kencana: Surabaya.
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi Edisi Revisi*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Ferguson, Sherry D. 2009. *Communication Planning : An Integrated Approach* . Sage Publication : California USA.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Kaufman, Roger A. 1972. *Educational System Planning*. Prentice Hall : New Jersey.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Kencana : Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Kencana: Jakarta.

- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Kencana: Jakarta.
- Nurudin. 2004. *Komunikasi Massa*. Cespur: Malang.
- Riyanto & Mahfud, Waryani Fajar & Mokhammad. 2012. *Komunikasi Islam I (Perspektif Integrasi-Interkoneksi)*. Galuh Patria: Yogyakarta.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusions of innovations, Forth Edition*. Tree Press: New York.
- Ruben, Brent D, Lea P Stewart. 1998. *Communication and Human Behaviour*. Allyn and Bacon : USA.
- Sastropetro, R. A. S. 1990. *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial*. Remaja Rosdakarya:Bandung.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.
- Suryadi, Edi. 2018. *Strategi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Unde, Alimuddin. 2014. *Televisi & Masyarakat Pluralistik*. Prenadamedia Group : Jakarta.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Jurnal**
- Agitia, Desi. 2019. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Program E-ktip Ditingkat Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(2): 122-127.
- Fitriani, Yuni. 2017. Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. *Jurnal Paradigma*. 19(2) : 148-152.
- Hanafi, Muhammad. 2016. Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Pada Objek Wisata Air Panas Hapanasan. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*. 3(1) : 1-15.
- Manggazali., Unde, A.A., Fatimah, J.M. 2018. Analisis Strategi Komunikasi Kospermindo Dalam Mengkampanyekan Konsumsi Rumput Laut Pada Masyarakat Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 7(1) : 158-165.
- Muhtar, S.M., Cangara, H., Unde, A.A. 2013. Strategi Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Humas PT. Semen Tonasa Terhadap Komunitas Lokal Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 2(1) : 90-99.
- Roberto, I., Kasnawi, T., Unde, A.A. 2016. Strategi Komunikasi Penyuluhan Program KB Vasektomi untuk Masyarakat Miskin Perkotaan di Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik KRITIS*. 2(2) : 106-115.
- Wadu'ud, Abdul dan Tuti Bahfiarti. 2016. Pola Penyebarluasan Informasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) tentang Pemberdayaan Masyarakat Lansia di Kabupaten Maros. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 5(1) : 130-145.

**Lain-Lain :**

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dokumen Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).